

EVALUASI TARIF ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN ABILITY TO PAY (ATP) DAN WILLINGNESS TO PAY (WTP) DI KOTA PANGKALPINANG

Revy Safitri

Email: revy.safitri@gmail.com

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung
Kampu Terpadu UBB Balunujuk, Merawang, Kab. Bangka

ABSTRAK

Kota Pangkalpinang sudah memiliki angkutan umum berupa angkot yang melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas. Namun, minat masyarakat Kota Pangkalpinang dalam menggunakan angkutan umum masih sangat rendah dan jumlah pengguna kendaraan pribadi terus meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum adalah tarif dari angkutan umum itu sendiri. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi tarif angkutan umum untuk mengetahui kesesuaian tarif yang berlaku terhadap kemampuan dan kemauan membayar masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi di Kota Pangkalpinang. Dalam penelitian ini, evaluasi tarif dilakukan berdasarkan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP). Dimana, pendekatan dalam analisis ATP berdasarkan besarnya alokasi biaya transportasi terhadap pendapatan dan frekuensi perjalanan dalam 1 bulan, sedangkan pendekatan analisis WTP berdasarkan kemauan membayar masyarakat terhadap kondisi pelayanan angkutan umum saat ini. Berdasarkan hasil evaluasi, tarif bukan masalah utama yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Agar dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dapat dilakukan dengan penyesuaian tingkat pelayanan. Dimana, Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu memperbaiki pelayanan angkutan umum yang selama ini masih mengandalkan angkot dengan menyediakan angkutan umum berbasis bus (Bus Rapid Transit) seperti di beberapa kota di Indonesia.

Kata kunci: Angkutan Umum, Tarif, Ability To Pay (ATP), Willingness To Pay (WTP)

PENDAHULUAN

Angkutan umum merupakan moda transportasi yang berperan memberikan pelayanan terhadap kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas, terutama masyarakat yang tidak memiliki alternatif pilihan moda transportasi (*captive riders*). Menurut Warpani, 2002,

angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar.

Angkutan umum sangat diperlukan di wilayah perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat yang berperan dalam

pengembangan kota. Kota Pangkalpinang sudah memiliki angkutan umum berupa angkot yang melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas. Namun, minat masyarakat Kota Pangkalpinang dalam menggunakan angkutan umum masih sangat rendah dan jumlah pengguna kendaraan pribadi terus meningkat.

Dalam upaya mengimbangi dan menekan laju penggunaan kendaraan pribadi diperlukan suatu perbaikan terhadap sistem angkutan umum. Dengan adanya perbaikan sistem angkutan umum diharapkan dapat meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum (*transit ridership*), dimana sebagian besar pengguna kendaraan pribadi dapat beralih menggunakan angkutan umum.

Menurut Taylor dan Fink, 2003, faktor – faktor yang mempengaruhi *transit ridership* dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu internal dan eksternal. Faktor internal sendiri meliputi tarif, kualitas dan kuantitas pelayanan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosio – ekonomi, faktor kewilayahan, dan *public finance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum adalah tarif dari angkutan umum itu sendiri. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi tarif angkutan umum untuk mengetahui kesesuaian tarif yang berlaku terhadap kemampuan dan kemauan membayar masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi di Kota Pangkalpinang.

KAJIAN PUSTAKA

Tarif Angkutan Umum

Tarif adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa, baik melalui mekanisme perjanjian sewa menyewa, tawar menawar, maupun ketetapan pemerintah (Warpani, 2002). Disamping itu, menurut Vuchic, 2005, tarif angkutan umum merupakan faktor terbesar dalam menarik orang untuk melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum, dan merupakan elemen dasar sistem operasi angkutan umum yang mempengaruhi kondisi keuangan operator angkutan umum.

Menurut Tamin, dkk., 1999, tarif angkutan umum bisa berupa tarif seragam (*flat fares*) ataupun tarif berdasarkan jarak (*distance – based fares*), dimana dalam menetapkan tarif melibatkan tiga pihak yaitu:

1. Penyedia jasa transportasi (*operator*), tarif adalah harga dari jasa yang diberikan.
2. Pengguna jasa angkutan (*user*), tarif adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap kali menggunakan angkutan umum.
3. Pemerintah (*regulator*), sebagai pihak yang menentukan tarif resmi. Besarnya tarif berpengaruh terhadap besarnya pendapatan daerah pada sektor transportasi.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tarif jasa angkutan menurut Warpani, 2002, yaitu:

- Kelangsungan hidup dan pengembangan usaha jasa angkutan.

- Daya beli masyarakat pada umumnya.
- Tingkat bunga modal.
- Jangka waktu pengembalian modal.
- Biaya masyarakat (*social cost*) yang ditimbulkan karena operasi jasa angkutan.

Ability To Pay (ATP)

Ability To Pay (ATP) adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal.

Menurut, Tamin, dkk., 1999, pendekatan yang digunakan dalam analisis ATP didasarkan pada alokasi biaya untuk transportasi dan pendapatan yang diterimanya, dengan kata lain ATP adalah kemampuan masyarakat dalam membayar ongkos perjalanan yang dilakukannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi ATP diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Besar penghasilan
- 2) Kebutuhan transportasi
- 3) Total biaya transportasi
- 4) Intensitas perjalanan
- 5) Pengeluaran total per bulan
- 6) Jenis Kegiatan
- 7) Persentase penghasilan yang digunakan untuk biaya transportasi

Willingness To Pay (WTP)

Willingness To Pay (WTP) adalah kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya.

Masih menurut Tamin, dkk., 1999, pendekatan yang digunakan dalam analisis WTP didasarkan pada persepsi pengguna terhadap tarif dari jasa pelayanan angkutan umum tersebut. Beberapa faktor yang

mempengaruhi WTP diantaranya, sebagai berikut:

1. Produksi jasa angkutan yang disediakan oleh pengusaha
2. Kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan pengusaha
3. Utilitas pengguna terhadap angkutan umum tersebut
4. Penghasilan pengguna.

Hubungan ATP dan WTP

Dalam pelaksanaan penentuan tarif angkutan umum, ada 3 kondisi hubungan antara ATP dan WTP, yaitu:

a) ATP lebih besar dari WTP

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar jasa transportasi lebih besar daripada kemauan membayar. Pada kondisi ini, pengguna mempunyai penghasilan yang relatif lebih tinggi tetapi utilitas terhadap jasa tersebut relatif lebih rendah, dimana pengguna disebut *choiced riders*.

b) ATP sama dengan WTP

Antara kemampuan dan kemauan membayar jasa ialah sama. Keseimbangan utilitas pengguna dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tersebut.

c) ATP lebih kecil dari WTP

Kemampuan membayar jasa transportasi lebih kecil daripada kemauan membayar. Pada kondisi ini, pengguna mempunyai penghasilan yang relatif lebih rendah tapi utilitas terhadap jasa tersebut relatif tinggi, dimana pengguna disebut *captive riders*.

Penentuan Tarif Berdasarkan ATP dan WTP

Penentuan tarif, pada prinsipnya dapat ditinjau dalam 3 aspek utama dalam sistem angkutan umum, yaitu:

- d) Pengguna (*user*)
- e) Operator
- f) Pemerintah (*regulator*)

Dalam penentuan tarif yang mengacu pada aspek pengguna, parameter yang ditinjau adalah ATP dan WTP. Menentukan nilai tarif berdasarkan ATP dan WTP memiliki prinsip sebagai berikut:

- a) ATP merupakan fungsi dari kemampuan membayar, sehingga nilai tarif yang diberlakukan tidak boleh melebihi nilai ATP kelompok masyarakat sasaran. Intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi langsung atau silang dibutuhkan pada kondisi dimana nilai tarif berlaku lebih besar dari ATP, hingga didapat nilai tarif yang sama besarnya dengan nilai ATP.
- b) WTP merupakan fungsi dari tingkat pelayanan angkutan umum, sehingga bila nilai WTP masih berada dibawah ATP maka masih dimungkinkan melakukan peningkatan nilai tarif dengan perbaikan tingkat pelayanan angkutan umum.



Gambar 1. Ilustrasi Keleluasaan Penentuan Tarif Berdasarkan ATP – WTP

Berdasarkan ilustrasi di atas, penyesuaian tarif diharapkan dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tidak melebihi nilai ATP.
- 2) Berada di antara nilai ATP dan WTP, bila akan dilakukan penyesuaian tingkat pelayanan.
- 3) Bila tarif yang diajukan berada di bawah perhitungan tarif, namun berada di atas ATP maka selisih tersebut dapat dianggap sebagai beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah (*regulator*).
- 4) Bila perhitungan tarif, pada suatu jenis kendaraan, berada jauh di bawah ATP dan WTP, maka terdapat keleluasaan dalam penyesuaian tarif yang baru, yang selanjutnya dapat dijadikan peluang penerapan subsidi silang, pada jenis kendaraan lain yang kondisi perhitungan tarif di atas ATP.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data untuk mendapatkan nilai ATP dan WTP di Kota Pangkalpinang terhadap angkutan umum yang ada dilakukan dengan survei

kuesioner (*questionnaire survey*) dan survei wawancara (*interview survey*) yang disebarkan ke 7 Kecamatan di Kota Pangkalpinang. Dimana, kuesioner disebarkan oleh tenaga survei (*surveyor*) secara langsung kepada responden dan *surveyor* juga bertindak sebagai pewawancara. Hal ini dimaksudkan agar lebih memperjelas maksud dari pertanyaan pada lembar kuesioner sehingga dapat membantu responden dalam mengisi kuesioner dengan baik. Selain itu, dalam mengevaluasi tarif perlu diketahui informasi mengenai tarif resmi dan tarif yang berlaku saat ini.

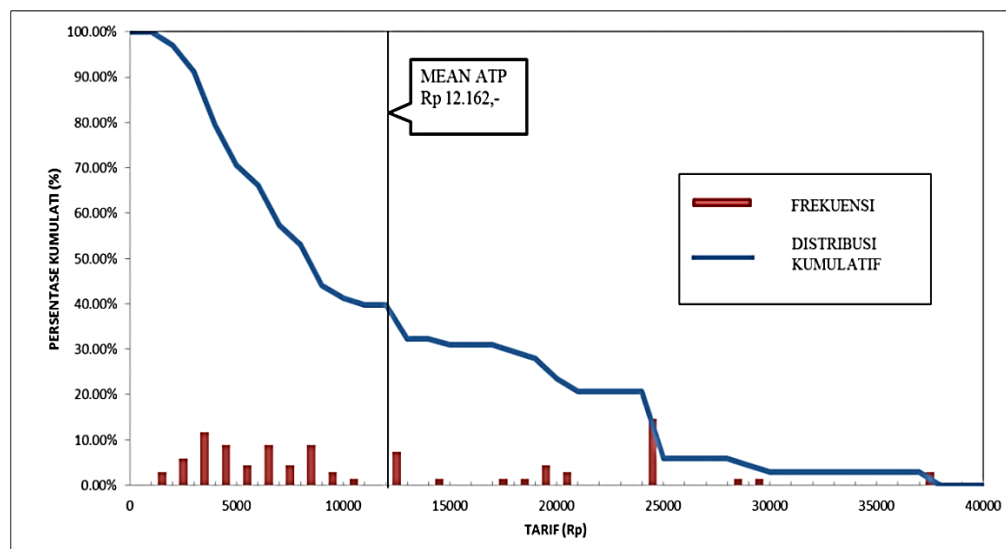
Analisis ATP dan WTP

Dalam penelitian ini, analisis *Ability To Pay* (ATP) dan *Willingness To Pay* (WTP)

dibagi berdasarkan kategori status pekerjaan. Selain itu, dikarenakan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, maka analisis ATP menggunakan pendekatan besarnya alokasi biaya transportasi terhadap pendapatan dan frekuensi perjalanan dalam 1 bulan. Sedangkan, analisis WTP berdasarkan kemauan membayar masyarakat terhadap kondisi pelayanan angkutan umum saat ini.

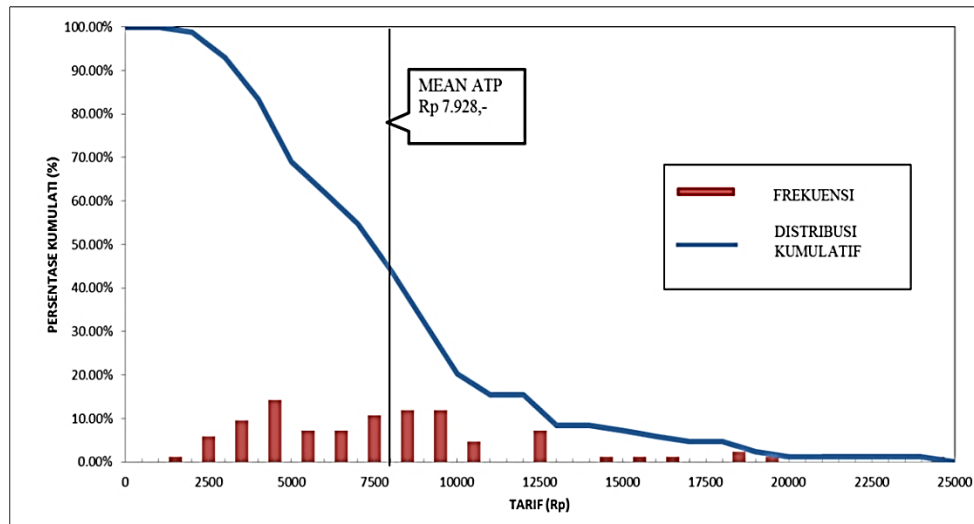
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, nilai ATP masyarakat terhadap angkutan umum di Kota Pangkalpinang tiap kategori ditampilkan berikut ini.



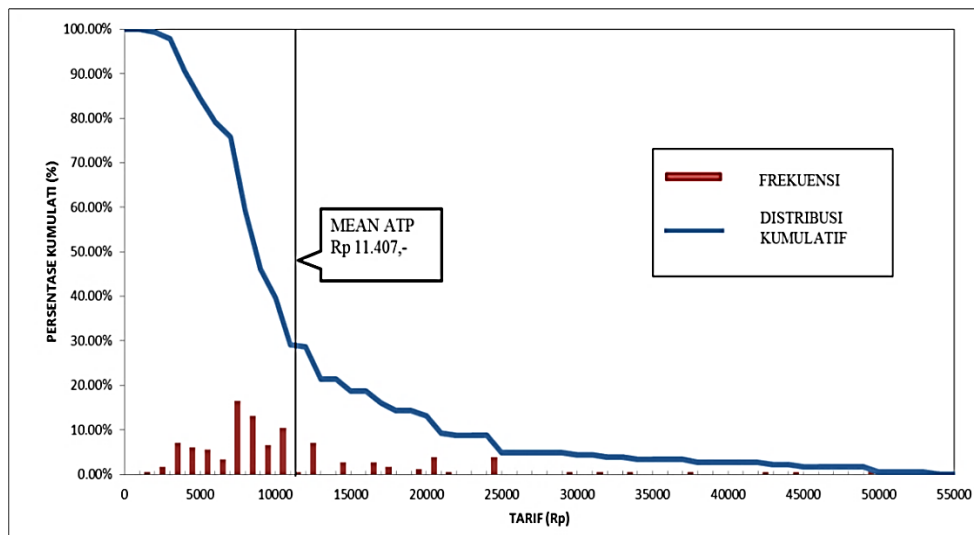
Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 2. Nilai ATP Kategori Tidak Bekerja



Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 3. Nilai ATP Kategori Pelajar/ Mahasiswa



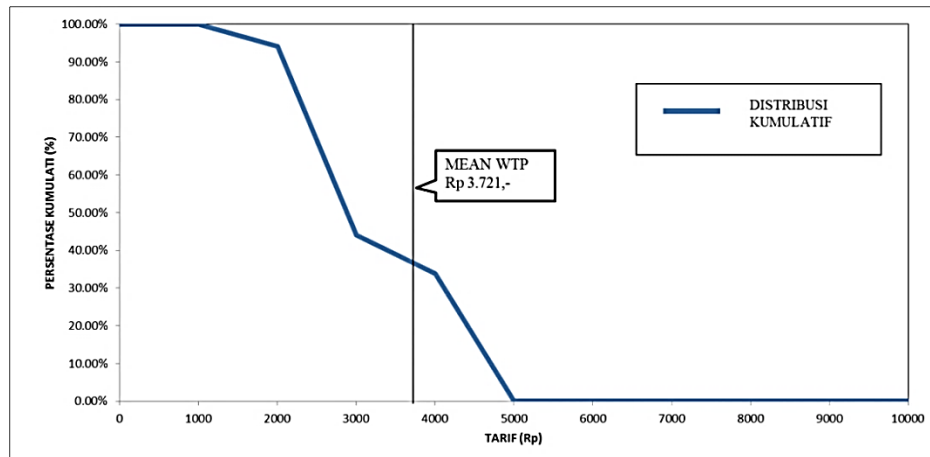
Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 4. Nilai ATP Kategori Bekerja/ Swasta

Berdasarkan grafik di atas, nilai ATP rata-rata sebesar Rp 12.162,00 untuk kategori tidak bekerja, Rp 7.928,00 untuk kategori pelajar/ mahasiswa, dan Rp 11.407,00 untuk kategori bekerja/ swasta. Dari nilai ATP rata-rata tiap kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai ATP rata-rata paling rendah sebesar Rp 7.928,00 dari kategori pelajar/ mahasiswa, dan nilai ATP paling tinggi sebesar Rp 12.162,00 dari kategori tidak bekerja. Pada analisis ini,

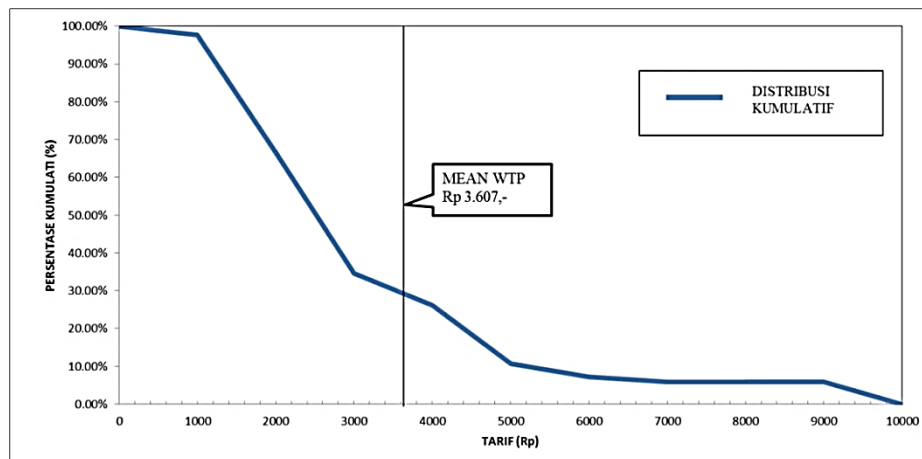
kategori tidak bekerja memberikan hasil nilai ATP rata-rata tertinggi disebabkan jumlah frekuensi perjalanan yang rendah tiap bulannya, sehingga memberikan nilai ATP yang besar dibandingkan kategori lainnya.

Selanjutnya, nilai WTP masyarakat terhadap angkutan umum di Kota Pangkalpinang tiap kategori ditampilkan berikut ini.



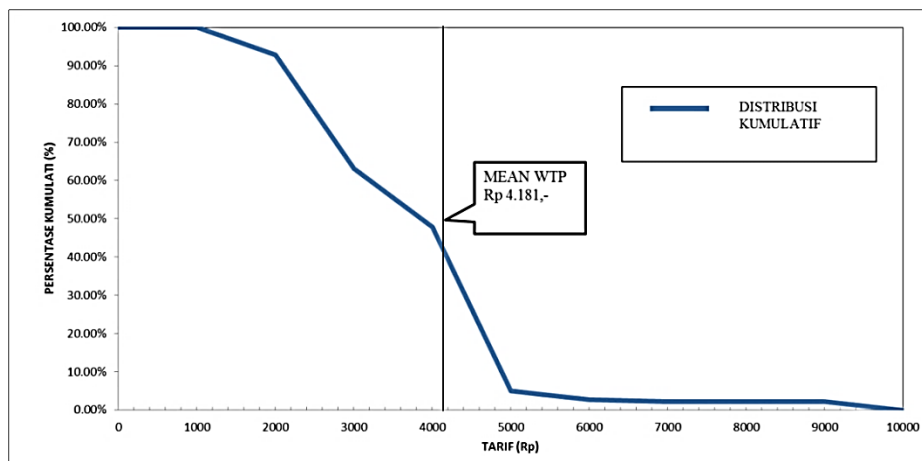
Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 5. Nilai WTP Kategori Tidak Bekerja



Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 6. Nilai WTP Kategori Pelajar/ Mahasiswa



Sumber: Hasil Analisis, 2016

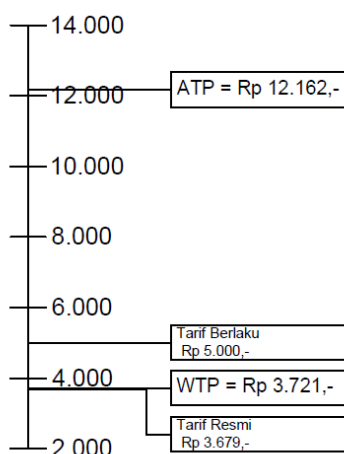
Gambar 7. Nilai WTP Kategori Bekerja/ Swasta

Berdasarkan grafik di atas, nilai WTP rata-rata sebesar Rp 3.721,00 untuk kategori tidak bekerja, Rp 3.607,00 untuk kategori pelajar/ mahasiswa, dan Rp 4.181,00 untuk

kategori bekerja/ swasta. Dari nilai WTP rata – rata tiap kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai WTP rata – rata paling rendah sebesar Rp 3.607,00 dari kategori pelajar/ mahasiswa, dan nilai ATP paling tinggi sebesar Rp 4.181,00 dari kategori bekerja/ swasta.

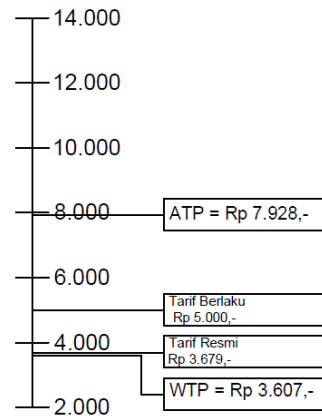
Evaluasi Tarif

Dalam mengevaluasi tarif, hasil analisis ATP dan WTP ditinjau terhadap tarif resmi dan tarif yang berlaku saat ini. Sesuai dengan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 279 Tahun 2013 tentang Tarif Resmi Angkutan Kota dalam Kota Pangkalpinang, besaran tarif angkutan kota dalam Kota Pangkalpinang sebesar Rp 3.679,00 untuk penumpang umum dan Rp 2.450,00 untuk penumpang pelajar/ mahasiswa. Sedangkan, berdasarkan hasil survei, tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp 5.000,00 untuk penumpang umum dan Rp 3.000,00 untuk penumpang pelajar/ mahasiswa. Diagram evaluasi tarif untuk masing – masing kategori ditampilkan berikut ini.



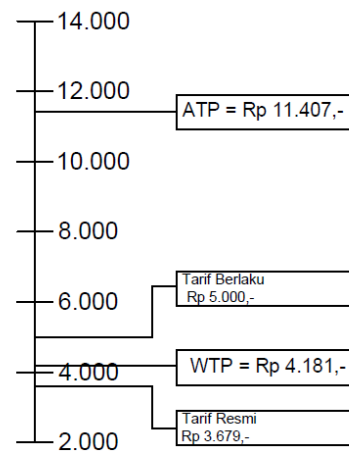
Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 8. Diagram Evaluasi Tarif
Kategori Tidak Bekerja



Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 9. Diagram Evaluasi Tarif
Kategori Pelajar/ Mahasiswa



Sumber: Hasil Analisis, 2016

Gambar 10. Diagram Evaluasi Tarif
Kategori Bekerja/ Swasta

Berdasarkan diagram di atas, pada semua kategori nilai ATP jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai WTP. Selain itu, kategori tidak bekerja dan bekerja/ swasta menunjukkan tarif resmi berada di bawah nilai WTP dan tarif berlaku berada diantara nilai ATP dan WTP. Sedangkan, kategori pelajar/ mahasiswa menunjukkan baik tarif resmi maupun tarif berlaku berada diantara nilai ATP dan WTP.

Dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan membayar angkutan umum

masyarakat di Kota Pangkalpinang lebih besar dari keinginan membayar. Selain itu, walaupun tarif yang berlaku lebih besar dibandingkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, tidak mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum di Kota Pangkalpinang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tarif bukan masalah utama yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat.

Bila ditinjau dari tarif berlaku yang berada di antara nilai ATP dan WTP, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dapat dilakukan dengan penyesuaian tingkat pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi tarif angkutan umum di Kota Pangkalpinang, dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar angkutan umum masyarakat di Kota Pangkalpinang lebih besar dari keinginan membayar. Selain itu, walaupun tarif yang berlaku lebih besar dibandingkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, tidak mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum di Kota Pangkalpinang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tarif bukan masalah utama yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dapat dilakukan dengan

penyesuaian tingkat pelayanan. Dimana, Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu memperbaiki pelayanan angkutan umum yang selama ini masih mengandalkan angkot dengan menyediakan angkutan umum berbasis bus (*Bus Rapid Transit*) seperti di beberapa kota di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 279 Tahun 2013 tentang Tarif Resmi Angkutan Kota dalam Kota Pangkalpinang.
- Kota Pangkalpinang Dalam Angka, 2016. BPS Kota Pangkalpinang.
- Tamin, Ofyar Z, dkk, 1999. Evaluasi Tarif Angkutan Umum dan Analisis 'Ability To Pay' (ATP) dan 'Willingness To Pay' (WTP) di DKI Jakarta. Jurnal Transportasi Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSTPT) Vol 1 No.2, Tahun I, Desember 1999, ISSN: 1411-2422.
- Taylor, Brian D dan Fink, Camile N.Y, 2003. *The Factor Influencing Transit Ridership: A Review and Analysis of the Ridership Literature*. University of California Transportation Center.
- Vuchic, Vukan R, 2005. *Urban Transit: Operations, Planning, and Economics*. Penerbit: John Wiley & Sons, Inc. United States of America.
- Warpani, Suwardjoko P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Penerbit: ITB. Bandung.